



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : REZA FAISAL SALEH
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 954124

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.669.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 185 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.848.000.000
2. Tanah Seluas 1.079 m2 di KAB / KOTA KOTA PAREPARE , Rp. 231.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/142 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 1.732.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 412 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.677.500.000
5. Tanah Seluas 494 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **506.350.000**

1. MOTOR, HONDA H1B02N42LO A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 7.600.000
2. MOBIL, TOYOTA ZENIX 2.0 HYBRID Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 498.750.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **450.120.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **41.232.732**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **325.000.000**

Sub Total **Rp.** **7.991.702.732**



III. HUTANG

Rp. 3.045.338.702

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.946.364.030

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.